

**IMPLEMENTATION OF SUSTAINABILITY REPORT PREPARATION IN
LOCAL GOVERNMENTS IN PAPUA PROVINCE: A CASE STUDY OF THE
JAYAPURA REGENCY GOVERNMENT**

**IMPLEMENTASI PENYUSUNAN LAPORAN KEBERLANJUTAN
(SUSTAINABILITY REPORT) PADA PEMERINTAH DAERAH DI PROVINSI
PAPUA STUDI KASUS: PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA**

Aaron M. A. Simanjuntak¹, Ulfah R. Muslimin², Komang Shinta Mellinda Saraswati³
Universitas Cenderawasih, Indonesia^{1,2,3}
aaronsimanjuntak@gmail.com¹, ulfahlud@gmail.com²

ABSTRACT

Sustainability reporting in the public sector still lags behind. This gap has also extended to sustainability reporting research, which has historically focused on the private sector, with limited attention given to local governments (Ball, 2004). This study is classified as exploratory research using a descriptive method, involving five respondents from each Regional Government Organization (OPD) as the research sample, covering 36 OPDs in Jayapura Regency. The results show that 75% of 114 respondents within the Jayapura Regency Government had heard of, seen, and/or read a Sustainability Report, while 25% (approximately 39 respondents) stated they had never heard of, seen, and/or read a Sustainability Report. Furthermore, 71% of 109 respondents indicated that they understood Sustainability Reports, whereas 29% (approximately 44 respondents) reported that they did not understand them. Additionally, 74% of 113 respondents demonstrated an understanding of the form or structure of Sustainability Reports, while 26% (approximately 40 respondents) stated that they did not understand the form of Sustainability Reports. Out of 37 GRI disclosure groups, 32 disclosure groups (approximately 86%) were considered relevant to local government. Among these, the GRI groups on Anti-Corruption, Indirect Economic Impacts, and Indigenous Peoples' Rights ranked as the highest priorities. Meanwhile, five GRI disclosures (approximately 14%) were considered moderately relevant to local government, with the GRI group on Diversity and Equal Opportunity ranking last in the priority scale.

Keywords: Sustainability Report, Sustainability Reporting, Exploratory Research

ABSTRAK

Pelaporan keberlanjutan di sektor publik masih tertinggal. Perbedaan tersebut telah meluas ke penelitian pelaporan keberlanjutan, yang secara historis diarahkan pada sektor swasta, dengan sedikit perhatian yang diberikan kepada pemerintah daerah (Ball, 2004). Penelitian ini termasuk jenis penelitian eksploratif dengan metode deskriptif, dengan mengambil 5 responden per OPD untuk menjadi sampel dalam penelitian ini yang berjumlah 36 OPD di Kabupaten Jayapura. Hasil penelitian terdapat 75% dari 114 responden dilingkungan Kabupaten Jayapura mayoritas pernah mendengar, melihat dan atau membaca Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report), sedangkan 25% atau sekitar 39 responden menjawab tidak pernah mendengar, melihat dan atau membaca Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report), terdapat 71% dari 109 responden dilingkungan Kabupaten Jayapura memahami tentang Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report), sedangkan 29% atau sekitar 44 responden menjawab tidak memahami tentang Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report), terdapat 74% dari 113 responden dilingkungan Kabupaten Jayapura memahami tentang bentuk Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report), sedangkan 26% atau sekitar 40 responden menjawab tidak memahami tentang bentuk Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report). Selanjutnya, dari 37 kelompok pengungkapan GRI, terdapat 32 kelompok pengungkapan GRI yang relevan atau sekitar 86% dengan pemerintah daerah, di mana kelompok GRI anti-korupsi, dampak ekonomi tidak langsung, dan hak masyarakat adat menempati urutan prioritas teratas. Lalu terdapat 5 pengungkapan GRI yang cukup relevan atau sekitar 14% dengan pemerintah daerah, di mana kelompok GRI Keanekaragaman dan kesempatan setara menempati urutan terakhir skala prioritas.

Kata Kunci: Sustainability Report, Laporan Keberlanjutan, Penelitian Eksploratif

PENDAHULUAN

Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) merupakan salah

satu instrumen penting yang menunjukkan bahwa suatu organisasi beroperasi sesuai dengan peraturan yang

berlaku serta bertanggung jawab kepada para pemangku kepentingan (Sejati & Prastiwi, 2015). Laporan ini tidak hanya memuat informasi mengenai kinerja ekonomi dan keuangan, tetapi juga mencakup aspek sosial dan lingkungan sebagai bagian dari komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/POJK.03/2017, Laporan Keberlanjutan adalah laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang berisi kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan hidup Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Emiten, dan Perusahaan Publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan.

Meskipun pelaporan keberlanjutan telah berkembang pesat di sektor swasta, implementasinya di sektor publik masih relatif tertinggal. Kesenjangan ini juga tercermin dalam penelitian akademik yang selama ini lebih banyak berfokus pada sektor swasta, sementara perhatian terhadap pemerintah daerah masih terbatas (Ball, 2004). Padahal, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan. Dengan memperkuat praktik pelaporan keberlanjutan di tingkat pemerintah daerah, terdapat peluang yang lebih besar untuk mengembangkan konsep pembangunan berkelanjutan sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik (Ball, 2007). Pemerintah daerah sebagai bagian dari sektor publik berpotensi menjadi aktor utama dalam mendorong tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (Ball, 2004).

Perkembangan positif di sektor publik ditunjukkan pada tahun 2020 ketika Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk pertama kalinya menerbitkan Laporan Keberlanjutan. Langkah ini merupakan bentuk

komitmen BPK untuk menjadi *role model* dalam melaporkan implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya. Inisiatif tersebut menunjukkan bahwa lembaga publik mulai menyadari pentingnya pelaporan keberlanjutan sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengkaji implementasi penyusunan Laporan Keberlanjutan pada pemerintah daerah dengan studi kasus Pemerintah Kabupaten Jayapura. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman aparatur pemerintah daerah terhadap konsep, keberadaan, dan bentuk Laporan Keberlanjutan. Pemahaman tersebut menjadi penting karena penyusunan Laporan Keberlanjutan di lingkungan pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus mendukung agenda pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Keagenan

Teori keagenan yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan kontraktual antara dua pihak, yaitu prinsipal dan agen. Prinsipal merupakan pihak yang memberikan mandat atau wewenang kepada agen untuk bertindak atas nama dan kepentingannya, sedangkan agen adalah pihak yang menerima mandat tersebut dan berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya. Dalam konteks pemerintahan daerah, masyarakat berperan sebagai prinsipal yang memberikan amanat kepada pemerintah daerah sebagai agen untuk mengelola sumber daya publik secara efektif dan bertanggung jawab.

Berkaitan dengan penyusunan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report), pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menyajikan informasi yang transparan, akuntabel, dan berkualitas kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan demikian, Laporan Keberlanjutan dapat menjadi instrumen untuk meminimalkan asimetri informasi antara pemerintah daerah dan masyarakat serta mendukung pengambilan keputusan di berbagai sektor.

Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report)

Laporan Keberlanjutan memiliki beragam definisi sesuai dengan perspektif para ahli. Menurut Elkington (1997), Sustainability Report adalah laporan yang tidak hanya memuat informasi kinerja keuangan, tetapi juga informasi nonkeuangan yang mencakup aktivitas sosial dan lingkungan perusahaan sebagai bagian dari upaya mencapai kinerja berkelanjutan (*sustainable performance*). Konsep ini sejalan dengan pendekatan *triple bottom line*, yang menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Falk (2007) menyatakan bahwa pelaporan keberlanjutan menjadi perhatian utama dalam pelaporan nonkeuangan dan mencakup empat kategori utama, yaitu lanskap bisnis (*business landscape*), strategi, kompetensi, serta sumber daya dan kinerja. Dalam konteks sektor publik, laporan keberlanjutan berfungsi sebagai media komunikasi yang menjelaskan komitmen pemerintah terhadap pembangunan berkelanjutan sekaligus sebagai sarana untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik.

Global Reporting Initiative (GRI)

Global Reporting Initiative (GRI) merupakan salah satu pedoman internasional yang banyak digunakan dalam penyusunan Laporan Keberlanjutan. Pedoman GRI secara berkala ditinjau dan diperbarui untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya dalam menjawab kebutuhan pelaporan keberlanjutan yang terus berkembang. Pembaruan G4, sebagai generasi keempat dari pedoman GRI, bertujuan untuk membantu organisasi menyusun laporan yang berfokus pada isu-isu material yang paling signifikan terkait keberlanjutan. Prinsip-prinsip pelaporan yang ditetapkan oleh GRI memberikan panduan mengenai isi laporan, pengungkapan standar, serta pedoman implementasi bagi organisasi dari berbagai ukuran, sektor, dan lokasi. Prinsip-prinsip tersebut berperan penting dalam mewujudkan transparansi dan kredibilitas laporan keberlanjutan, sehingga setiap organisasi yang menyusun laporan diharapkan menerapkannya secara konsisten.

Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan merupakan konsep pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan generasi masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Berdasarkan Pedoman Teknis yang dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tahun 2020, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) diarahkan pada upaya menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjamin keberlanjutan kehidupan sosial, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta memastikan keadilan dan tata kelola yang baik. Dalam konteks pemerintah daerah, implementasi pembangunan berkelanjutan menuntut

adanya kebijakan, program, dan pelaporan yang mampu mencerminkan integrasi antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi eksploratif dan deskriptif. Studi eksploratif bertujuan untuk menggali ide-ide baru atau mengidentifikasi hubungan-hubungan baru dari fenomena tertentu, terutama pada bidang yang masih memiliki keterbatasan penelitian sebelumnya (Elvis & Parulian, 2011). Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman awal mengenai implementasi penyusunan Laporan Keberlanjutan di lingkungan pemerintah daerah. Sementara itu, pendekatan deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran secara objektif mengenai suatu fenomena berdasarkan data yang diperoleh. Penelitian deskriptif menyajikan informasi terkait kondisi sosial tertentu, termasuk karakteristik sampel atau populasi penelitian (Elvis & Parulian, 2011). Melalui kombinasi kedua pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tingkat pemahaman dan kesiapan pemerintah daerah dalam menyusun Laporan Keberlanjutan.

Lokasi Penelitian

Adapun lokasi pada penelitian ini dilakukan di seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura yang beralamat di Gunung Merah Sentani, Jl. Raya Kemiri Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini termasuk penelitian eksploratif dengan metode statistik deskriptif. Statistika deskriptif adalah statistika yang menggunakan data

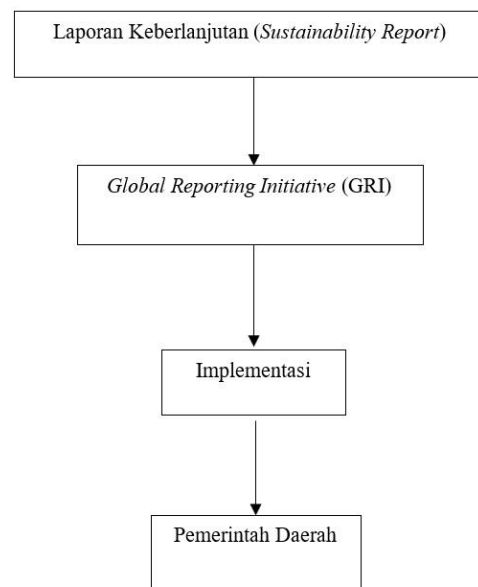
pada suatu kelompok untuk menjelaskan atau menarik kesimpulan mengenai kelompok itu saja.

Selain itu, dalam metode penelitian ini juga saya menggunakan analisis *crosstab*. Analisis *crosstab* adalah suatu metode analisis berbentuk tabel yang menampilkan tabulasi silang dari data yang diamati

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017). Populasi dalam hal ini adalah seluruh OPD (36 OPD) yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura.

Metode pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *non-probability sampling* di mana tidak semua individu dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel penelitian (Kumar, 1999). Responden dipilih melalui teknik *purposive sampling*.



Gambar 1. Kerangka Alur Penelitian

Sumber: Peneliti 2023

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Luas wilayah Kabupaten Jayapura 17.514 km² yang terbagi dalam 19 distrik, 139 kampung dan 5 kelurahan dengan penduduk berjumlah 145.503 jiwa dan kepadatan penduduk 6,73 jiwa/Km². Penduduk terbanyak dan terpadat berada di Distrik Sentani, yaitu sebanyak 60.531 jiwa (35,39%) dengan kepadatan 178,75 jiwa/Km² dan penduduk paling sedikit atau kepadatan terendah adalah Distrik Airu, yaitu sebanyak 609 jiwa (1,55%) dengan kepadatan penduduk kurang dari 1 jiwa/Km²

(Sumber: <https://jayapurakab.go.id/geografis>).



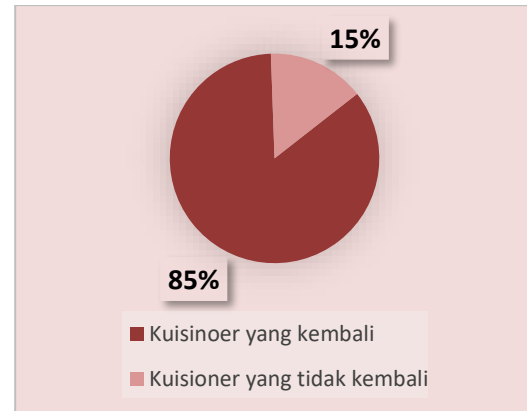
Gambar 2. Peta Kabupaten Jayapura

Sumber: Peta Tematik Indonesia, 2019

Deskripsi Karakteristik Responden

Data penelitian ini diperoleh peneliti dengan cara membagikan kuesioner offline ke masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan mengambil 5 responden per OPD untuk menjadi sampel dalam penelitian ini. Responden dalam penelitian ini adalah Bapak/Ibu/Sdr/I pegawai yang bekerja di 36 OPD yang ada di Kabupaten Jayapura dengan total jumlah sampel sebanyak 180 sampel (responden). Sebanyak 153 atau sekitar 85% responden telah mengembalikan kuesioner yang didapatkan dari 32 OPD di Kabupaten Jayapura. Sedangkan

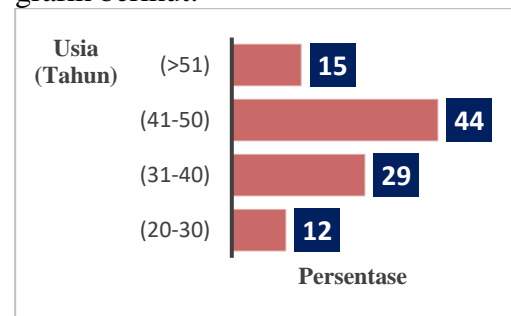
sisanya sebanyak 27 atau sekitar 15% (responden) tidak mengembalikan kuesioner, seperti pada tabel dibawah ini:



Grafik 1. Kuesioner yang diolah

Usia (Tahun)

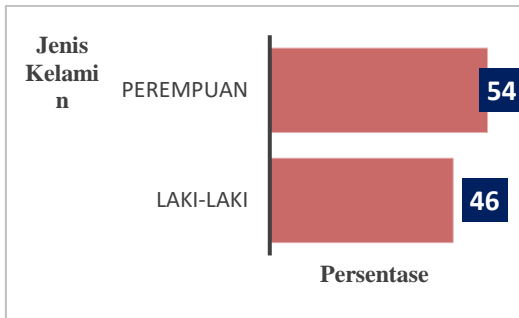
Data sebaran kuesioner menunjukkan bahwa tingkat usia pegawai di Kabupaten Jayapura berbeda-beda, mulai dari usia 20-an hingga lebih dari 51 tahun. Untuk mengetahui lebih jelas tentang usia responden, maka dapat dilihat dalam grafik berikut:



Grafik 2. Distribusi Usia Responden

Jenis Kelamin

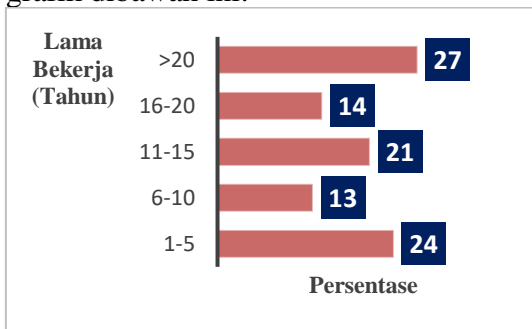
Jumlah responden pada penelitian ini sebanyak 153 orang yang terdiri dari 70 responden laki-laki atau sekitar 46% dan 83 responden perempuan atau sekitar 54%. Jumlah responden pada penelitian ini melibatkan 32 OPD di Kabupaten Jayapura. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Grafik 3. Jenis Kelamin Responden

Lama Bekerja (Tahun)

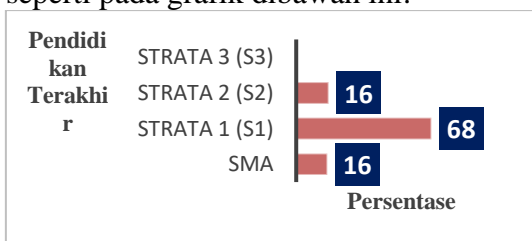
Data yang diperoleh menunjukkan bahwa lama bekerja (tahun) para responden di Kabupaten Jayapura cukup beragam. Berikut ini dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Grafik 4. Lama Bekerja (Tahun) Responden

Pendidikan Terakhir

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan, bahwa jenjang pendidikan terakhir para responden cukup beragam, seperti pada grafik dibawah ini:



Grafik 5. Pendidikan Terakhir Responden

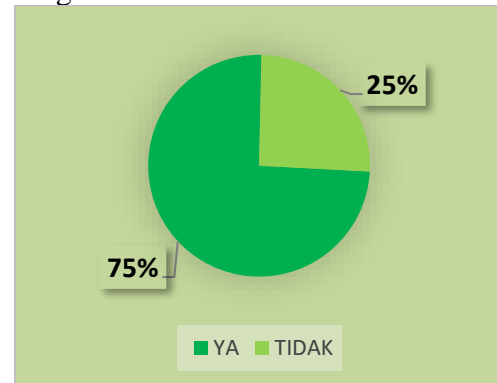
Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dari 153 data responden yang diperoleh, selanjutnya akan dilakukan analisis crosstab tiga pertanyaan umum terkait laporan keberlanjutan

(*Sustainability Report*) terhadap karakteristik responden, yaitu berupa usia (tahun), jenis kelamin, lama bekerja (tahun), dan pendidikan terakhir untuk mengidentifikasi dan mengetahui adanya hubungan antarvariabel, sedangkan untuk pengungkapan GRI dilakukan dengan melihat persentase data hasil responden.

Pengetahuan tentang Laporan Berkelanjutan (*Sustainability Report*)

Dari data hasil penelitian, terdapat 3 pertanyaan umum yang ditujukan kepada responden terkait laporan keberlanjutan (*Sustainability Report*). Ketiga pertanyaan umum tersebut sebagai berikut:

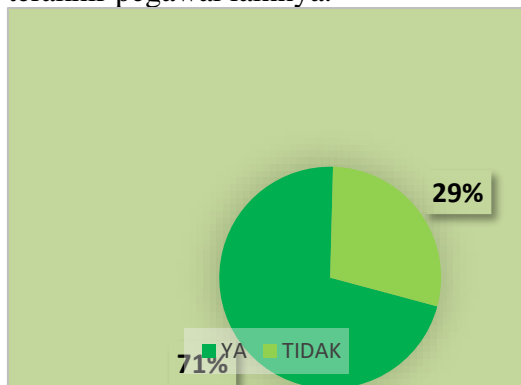


Grafik 6. Jumlah dan persentase pegawai pemerintah daerah yang mendengar, melihat dan atau membaca Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*)

Selanjutnya, jika dianalisis lebih lanjut berdasarkan usia responden yang ada, terlihat bahwa pegawai pemerintah daerah Kabupaten Jayapura dengan rentang usia 41-50 tahun memiliki persentase lebih besar (79,4%) dalam mendengar, melihat dan/atau membaca Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) dibandingkan dengan rentang usia pegawai lainnya. Setelah itu, jika dilihat dari analisis berdasarkan jenis kelamin, sebanyak 75,9% pegawai pemerintah daerah Kabupaten Jayapura yang berjenis kelamin perempuan memiliki persentase lebih besar

dibandingkan dengan jenis kelamin laki-laki dalam mendengar, melihat dan/atau membaca laporan keberlanjutan (*Sustainability Report*).

Kemudian, jika dilihat juga dari analisis berdasarkan rentang waktu atau lama bekerja responden yang ada, terlihat bahwa pegawai pemerintah daerah Kabupaten Jayapura yang memiliki rentang waktu selama 11-15 tahun memiliki persentase lebih besar sekitar 84,4% dalam mendengar, melihat, dan/atau membaca laporan keberlanjutan dibandingkan dengan rentang waktu atau lama bekerja lainnya. Dan yang terakhir, jika dianalisis berdasarkan tingkat pendidikan terakhir responden yang ada, terlihat bahwa umumnya pegawai pemerintah daerah Kabupaten Jayapura yang memiliki pendidikan terakhir Strata 2 (S2) memiliki persentase lebih besar dalam mendengar, melihat, dan atau membaca laporan keberlanjutan dibandingkan dengan latar belakang pendidikan terakhir pegawai lainnya.

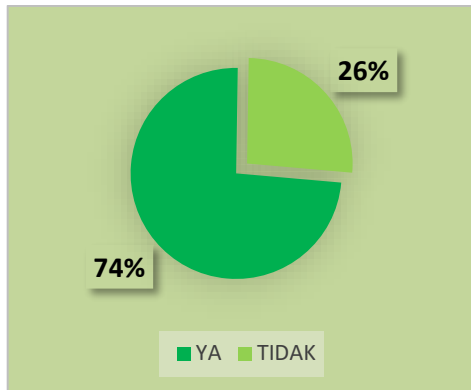


Grafik 7. Jumlah dan persentase pegawai pemerintah daerah yang memahami Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*)

Dari data yang diperoleh seperti pada tabel di atas, yaitu terdapat 71% dari 109 responden yang menjawab ya, ini berarti mayoritas pegawai di lingkungan Kabupaten Jayapura memahami tentang Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*), sedangkan 29% atau sekitar 44

responden menjawab tidak memahami tentang Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*).

Jika dianalisis lebih lanjut berdasarkan usia responden yang ada, terlihat bahwa pegawai pemerintah daerah Kabupaten Jayapura dengan rentang usia 41-50 tahun memiliki persentase lebih besar (77,9%) dalam memahami Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) dibandingkan dengan rentang usia pegawai lainnya. Selanjutnya, jika dilihat berdasarkan analisis jenis kelamin, sebanyak 73,5% pegawai pemerintah daerah Kabupaten Jayapura yang berjenis kelamin perempuan memiliki persentase lebih besar dibandingkan dengan jenis kelamin laki-laki dalam memahami Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*). Kemudian, jika dilihat juga dari analisis berdasarkan rentang waktu atau lama bekerja responden yang ada, terlihat bahwa pegawai pemerintah daerah Kabupaten Jayapura yang memiliki rentang waktu selama 11-15 tahun memiliki persentase lebih besar sekitar 78,1% dalam memahami Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) dibandingkan dengan rentang waktu atau lama bekerja pegawai lainnya. Dan yang terakhir, jika dilihat berdasarkan analisis tingkat pendidikan terakhir responden yang ada, terlihat bahwa umumnya pegawai pemerintah daerah Kabupaten Jayapura yang memiliki Pendidikan terakhir Strata 2 (S2) memiliki persentase lebih besar dalam memahami Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) dibandingkan latar belakang pendidikan terakhir pegawai lainnya.



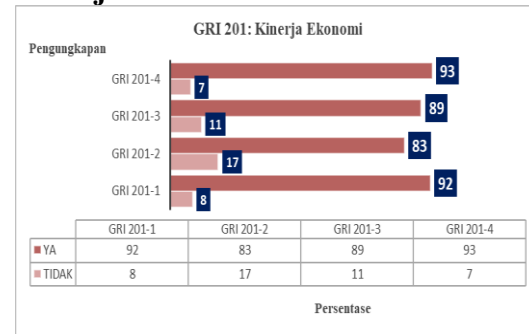
Grafik 8. Jumlah dan persentase pegawai pemerintah daerah yang memiliki pemahaman terkait bentuk Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*)

Dari data yang diperoleh seperti pada tabel di atas, terdapat 74% dari 113 responden yang menjawab ya, Ini berarti mayoritas pegawai di lingkungan Kabupaten Jayapura memahami tentang bentuk Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*), sedangkan 26% atau sekitar 40 responden menjawab tidak memahami tentang bentuk Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*).

Selanjutnya, jika dianalisis lebih lanjut berdasarkan usia responden yang ada, terlihat bahwa pegawai pemerintah daerah Kabupaten Jayapura dengan rentang usia 41-50 tahun memiliki persentase lebih besar (77,9%) dalam memahami bentuk Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) dibandingkan dengan rentang usia pegawai lainnya. Berbeda dengan sebelumnya, jika dilihat dari analisis berdasarkan jenis kelamin, sebanyak 75,7% pegawai pemerintah daerah Kabupaten Jayapura yang berjenis kelamin laki-laki memiliki persentase lebih besar dibandingkan dengan jenis kelamin perempuan dalam memahami bentuk Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*). Lalu, jika dilihat juga dari analisis berdasarkan rentang waktu atau lama bekerja responden yang ada, terlihat bahwa pegawai pemerintah daerah Kabupaten Jayapura yang

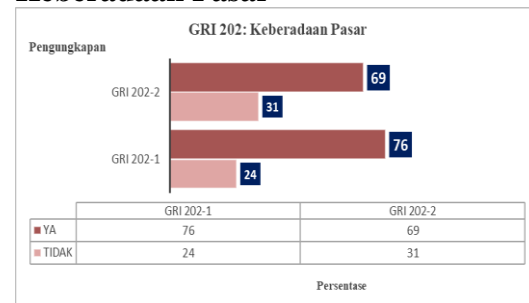
memiliki rentang waktu selama 11-15 tahun memiliki persentase lebih besar sekitar 81,3% dalam memahami bentuk Laporan Keberlanjutan dibandingkan rentang waktu atau lama bekerja lainnya. Dan yang terakhir, jika dianalisis berdasarkan tingkat pendidikan terakhir responden yang ada, terlihat bahwa umumnya pegawai pemerintah daerah Kabupaten Jayapura yang memiliki pendidikan terakhir Strata 2 (S2) memiliki persentase lebih besar dalam memahami bentuk laporan keberlanjutan dibandingkan dengan latar belakang pendidikan terakhir pegawai lainnya.

Pengungkapan GRI Kinerja Ekonomi



Secara umum, terkait dengan pengungkapan informasi kinerja ekonomi, mayoritas pegawai pemerintah daerah setuju untuk mengungkapkan informasi kinerja ekonomi. Ini terlihat dari jumlah responden yang menyatakan setuju sampai dengan 89%.

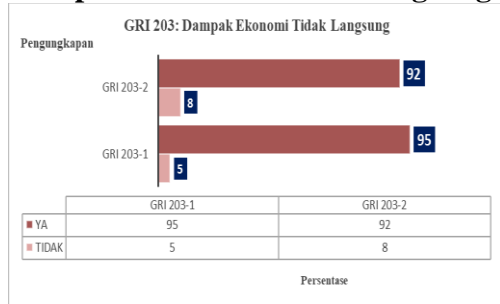
Keberadaan Pasar



Secara umum, terkait dengan pengungkapan informasi keberadaan pasar, mayoritas pegawai pemerintah daerah setuju untuk mengungkapkan

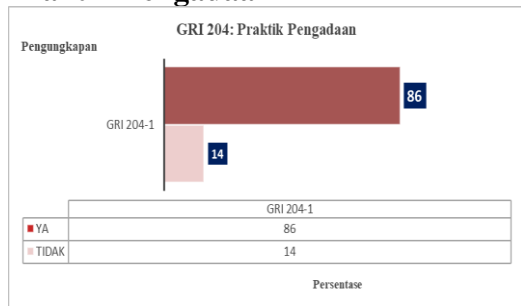
informasi keberadaan pasar. Ini terlihat dari jumlah responden yang menyatakan setuju sampai dengan 73%.

Dampak Ekonomi Tidak Langsung



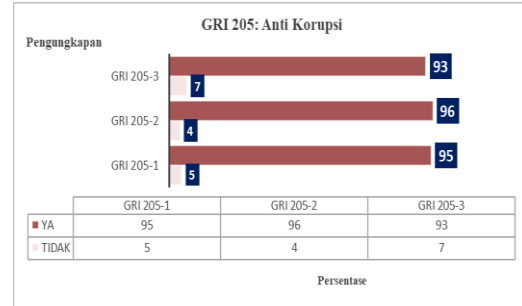
Secara umum, terkait dengan pengungkapan informasi dampak ekonomi tidak langsung, mayoritas pegawai pemerintah daerah setuju untuk mengungkapkan informasi tentang dampak ekonomi tidak langsung. Ini terlihat dari jumlah responden yang menyatakan setuju sampai dengan 93%.

Praktik Pengadaan



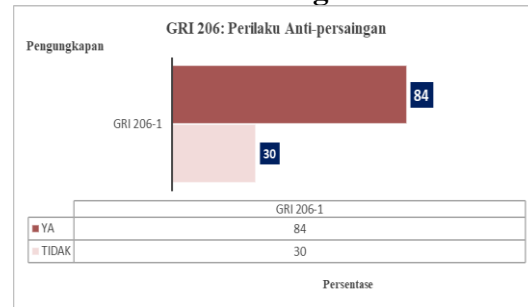
Secara umum, terkait dengan pengungkapan informasi praktik pengadaan, mayoritas pegawai pemerintah daerah setuju untuk mengungkapkan informasi tentang proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal. Ini terlihat dari jumlah responden yang menyatakan setuju sampai dengan 86%.

Anti Korupsi



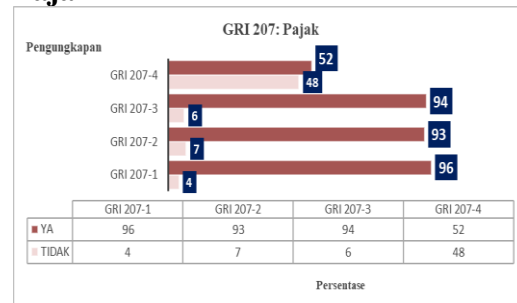
Secara umum, terkait dengan pengungkapan informasi antikorupsi, mayoritas pegawai pemerintah daerah setuju untuk mengungkapkan informasi tentang antikorupsi. Ini terlihat dari jumlah responden yang menyatakan setuju sampai dengan 95%.

Perilaku Anti-Persaingan



Secara umum, terkait dengan pengungkapan informasi praktik pengadaan, mayoritas pegawai pemerintah daerah setuju untuk mengungkapkan informasi tentang perilaku anti-persaingan. Ini terlihat dari jumlah responden yang menyatakan setuju sampai dengan 84%.

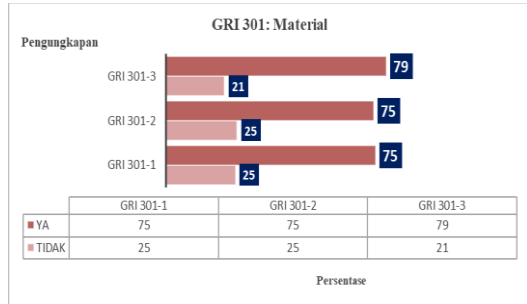
Pajak



Secara umum, terkait dengan pengungkapan informasi pajak, mayoritas pegawai pemerintah daerah setuju untuk mengungkapkan informasi

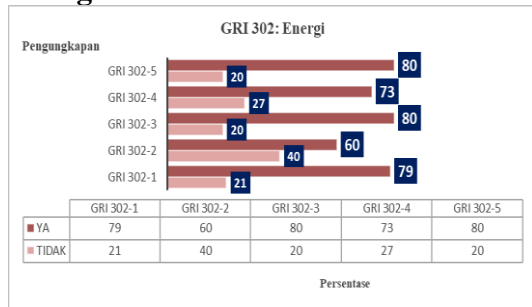
tentang pajak. Ini terlihat dari jumlah responden yang menyatakan setuju sampai dengan 84%.

Material



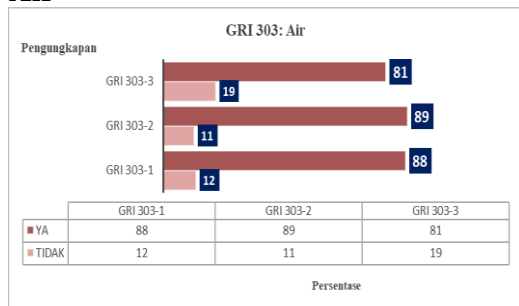
Secara umum, terkait dengan pengungkapan informasi material, mayoritas pegawai pemerintah daerah setuju untuk mengungkapkan informasi tentang material. Ini terlihat dari jumlah responden yang menyatakan setuju sampai dengan 76%.

Energi



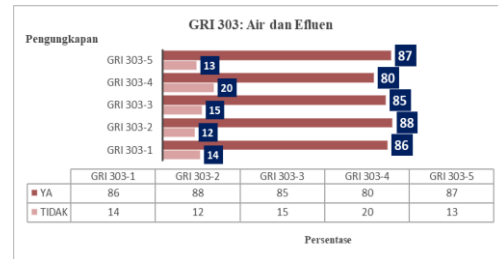
Secara umum, terkait dengan pengungkapan informasi energi, mayoritas pegawai pemerintah daerah setuju untuk mengungkapkan informasi tentang energi. Ini terlihat dari jumlah responden yang menyatakan setuju sampai dengan 75%.

Air



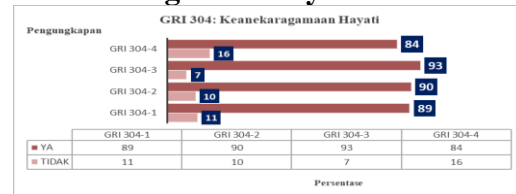
Secara umum, terkait dengan pengungkapan informasi air, mayoritas pegawai pemerintah daerah setuju untuk mengungkapkan informasi tentang air. Ini terlihat dari jumlah responden yang menyatakan setuju sampai dengan 86%.

Air dan Efluen



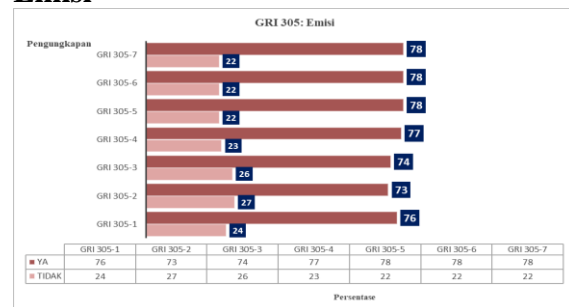
Secara umum, terkait dengan pengungkapan informasi air dan efluen, mayoritas pegawai pemerintah daerah setuju untuk mengungkapkan informasi tentang air dan efluen. Ini terlihat dari jumlah responden yang menyatakan setuju sampai dengan 85%.

Keanekaragaman Hayati



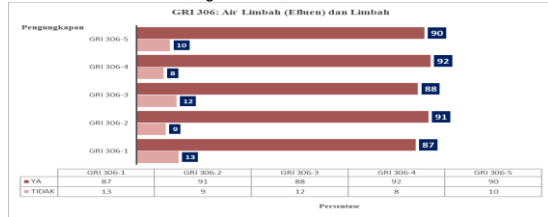
Secara umum, terkait dengan pengungkapan informasi keanekaragaman hayati, mayoritas pegawai pemerintah daerah setuju untuk mengungkapkan informasi tentang keanekaragaman hayati. Ini terlihat dari jumlah responden yang menyatakan setuju sampai dengan 89%.

Emisi



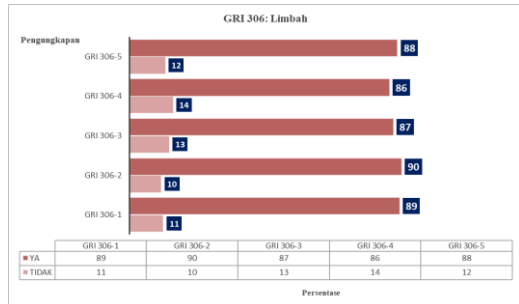
Secara umum, terkait dengan pengungkapan informasi emisi, mayoritas pegawai pemerintah daerah setuju untuk mengungkapkan informasi tentang emisi. Ini terlihat dari jumlah responden yang menyatakan setuju sampai dengan 76%.

Air Limbah (Efluen) dan Limbah



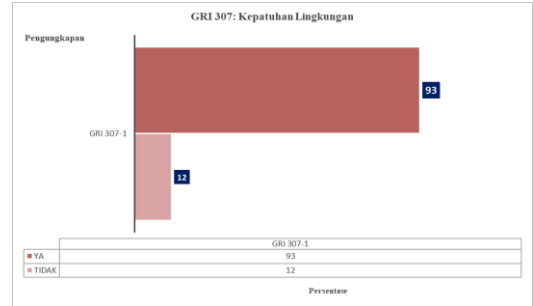
Secara umum, terkait dengan pengungkapan informasi air limbah (efluen) dan limbah, mayoritas pegawai pemerintah daerah setuju untuk mengungkapkan informasi tentang air limbah (efluen) dan limbah. Ini terlihat dari jumlah responden yang menyatakan setuju sampai dengan 89%.

Limbah



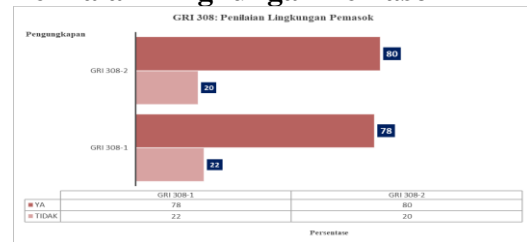
Secara umum, terkait dengan pengungkapan informasi air limbah, mayoritas pegawai pemerintah daerah setuju untuk mengungkapkan informasi tentang limbah. Ini terlihat dari jumlah responden yang menyatakan setuju sampai dengan 88%.

Kepatuhan Lingkungan



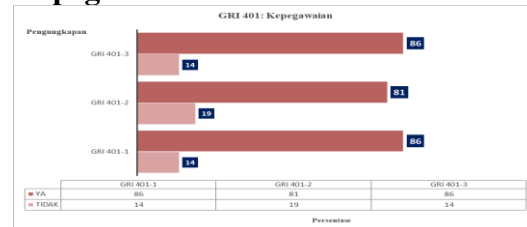
Secara umum, terkait dengan pengungkapan informasi kepatuhan lingkungan, mayoritas pegawai pemerintah daerah setuju untuk mengungkapkan informasi tentang kepatuhan lingkungan. Ini terlihat dari jumlah responden yang menyatakan setuju sampai dengan 93%.

Penilaian Lingkungan Pemasok



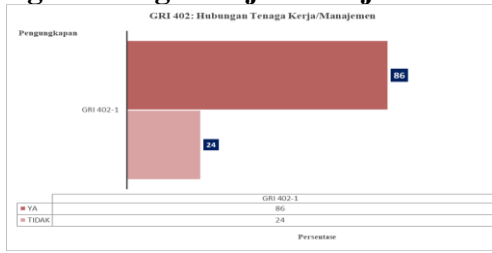
Secara umum, terkait dengan pengungkapan informasi penilaian lingkungan pemasok, mayoritas pegawai pemerintah daerah setuju untuk mengungkapkan informasi tentang penilaian lingkungan pemasok. Ini terlihat dari jumlah responden yang menyatakan setuju sampai dengan 79%.

Kepegawaian



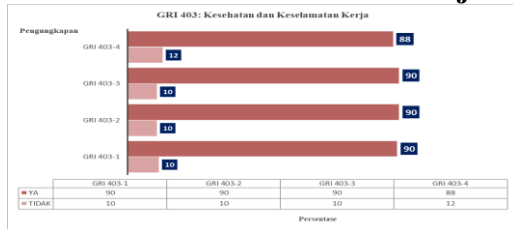
Secara umum, terkait dengan pengungkapan informasi kepegawaian, mayoritas pegawai pemerintah daerah setuju untuk mengungkapkan informasi tentang kepegawaian. Ini terlihat dari jumlah responden yang menyatakan setuju sampai dengan 85%.

Hubungan Tenaga Kerja/Manajemen



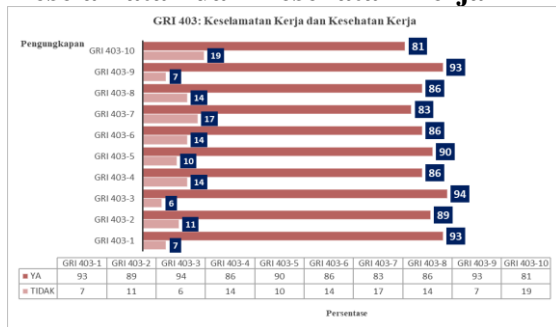
Secara umum, terkait dengan pengungkapan informasi hubungan tenaga kerja/manajemen, mayoritas pegawai pemerintah daerah setuju untuk mengungkapkan informasi tentang hubungan tenaga kerja/manajemen. Ini terlihat dari jumlah responden yang menyatakan setuju sampai dengan 86%.

Kesehatan dan Keselamatan Kerja



Secara umum, terkait dengan pengungkapan informasi kesehatan dan keselamatan kerja, mayoritas pegawai pemerintah daerah setuju untuk mengungkapkan informasi tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Ini terlihat dari jumlah responden yang menyatakan setuju sampai dengan 90%.

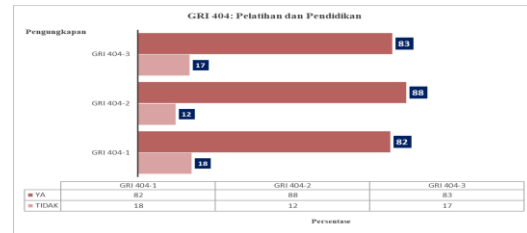
Keselamatan dan Kesehatan Kerja



Secara umum, terkait dengan pengungkapan informasi keselamatan dan kesehatan kerja, mayoritas pegawai pemerintah daerah setuju untuk mengungkapkan informasi tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Ini

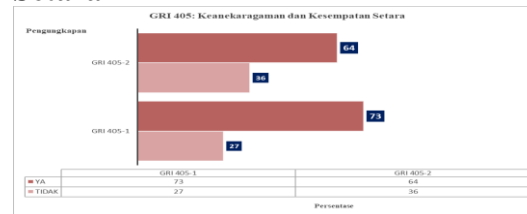
terlihat dari jumlah responden yang menyatakan setuju sampai dengan 88%.

Pelatihan dan Pendidikan



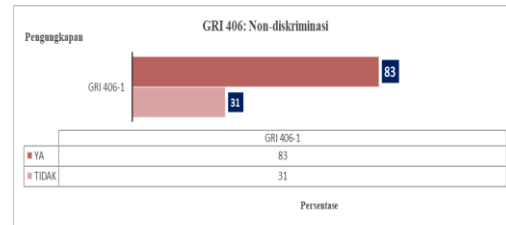
Secara umum, terkait dengan pengungkapan informasi pelatihan dan pendidikan, mayoritas pegawai pemerintah daerah setuju untuk mengungkapkan informasi tentang pelatihan dan pendidikan. Ini terlihat dari jumlah responden yang menyatakan setuju sampai dengan 84%.

Keanekaragaman dan Kesempatan Setara



Secara umum, terkait dengan pengungkapan informasi keanekaragaman dan kesempatan setara, mayoritas pegawai pemerintah daerah setuju untuk mengungkapkan informasi tentang keanekaragaman dan kesempatan setara. Ini terlihat dari jumlah responden yang menyatakan setuju sampai dengan 68%.

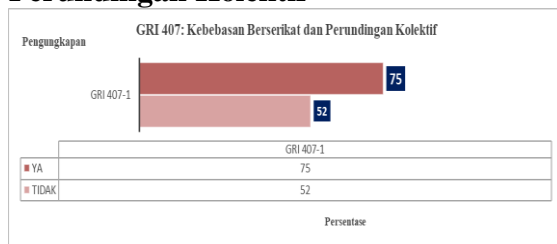
Non-Diskriminasi



Secara umum, terkait dengan pengungkapan informasi non-diskriminasi, mayoritas pegawai pemerintah daerah setuju untuk

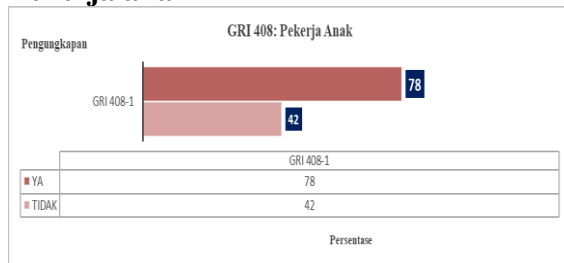
mengungkapkan informasi tentang non-diskriminasi. Ini terlihat dari jumlah responden yang menyatakan setuju sampai dengan 90%.

Kebebasan Berserikat dan Perundingan Kolektif



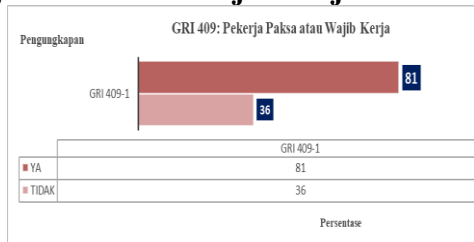
Secara umum, terkait dengan pengungkapan informasi tentang kebebasan berserikat dan perundingan kolektif, mayoritas pegawai pemerintah daerah setuju untuk mengungkapkan informasi tentang kebebasan berserikat dan perundingan kolektif. Ini terlihat dari jumlah responden yang menyatakan setuju sampai dengan 75%.

Pekerja anak



Secara umum, terkait dengan pengungkapan informasi pekerja anak, mayoritas pegawai pemerintah daerah setuju untuk mengungkapkan informasi tentang pekerja anak. Ini terlihat dari jumlah responden yang menyatakan setuju sampai dengan 78%.

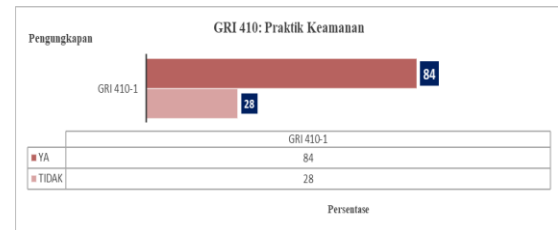
Pekerja Paksa atau Wajib Kerja



Secara umum, terkait dengan

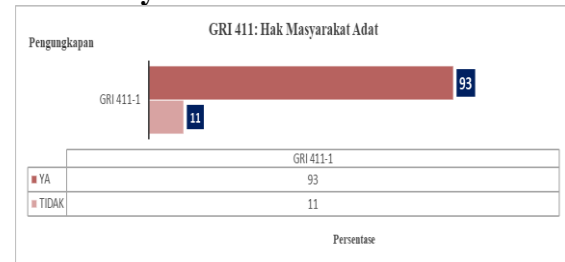
pengungkapan informasi pekerja paksa atau wajib kerja, mayoritas pegawai pemerintah daerah setuju untuk mengungkapkan informasi tentang pekerja paksa atau wajib kerja. Ini terlihat dari jumlah responden yang menyatakan setuju sampai dengan 81%.

Praktik Keamanan



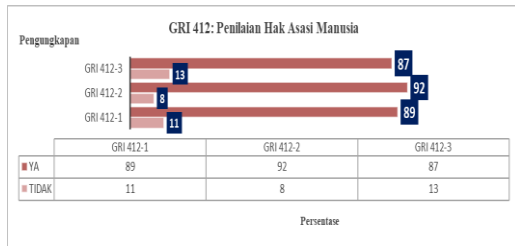
Secara umum, terkait dengan pengungkapan informasi praktik keamanan, mayoritas pegawai pemerintah daerah setuju untuk mengungkapkan informasi tentang praktik keamanan. Ini terlihat dari jumlah responden yang menyatakan setuju sampai dengan 84%.

Hak Masyarakat Adat



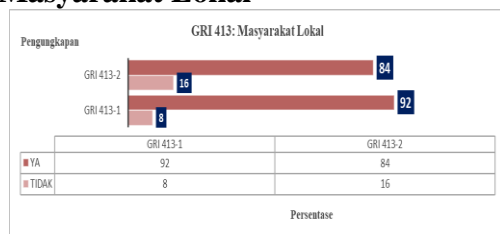
Secara umum, terkait dengan pengungkapan informasi hak masyarakat adat, mayoritas pegawai pemerintah daerah setuju untuk mengungkapkan informasi tentang hak masyarakat adat. Ini terlihat dari jumlah responden yang menyatakan setuju sampai dengan 93%.

Penilaian Hak Asasi Manusia



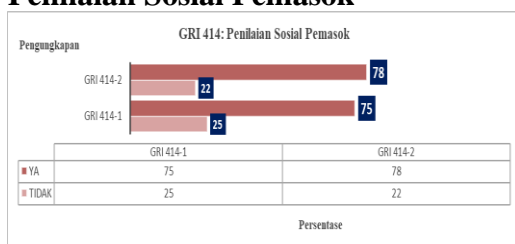
Secara umum, terkait dengan pengungkapan informasi penilaian hak asasi manusia, mayoritas pegawai pemerintah daerah setuju untuk mengungkapkan informasi tentang penilaian hak asasi manusia. Ini terlihat dari jumlah responden yang menyatakan setuju sampai dengan 89%.

Masyarakat Lokal



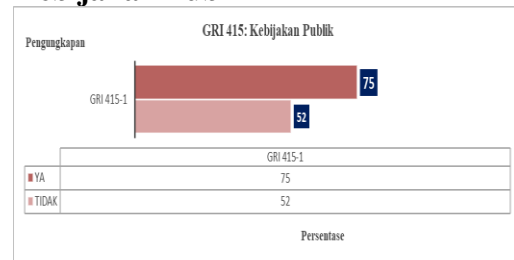
Secara umum, terkait dengan pengungkapan informasi masyarakat lokal, mayoritas pegawai pemerintah daerah setuju untuk mengungkapkan informasi tentang masyarakat lokal. Ini terlihat dari jumlah responden yang menyatakan setuju sampai dengan 88%.

Penilaian Sosial Pemasok



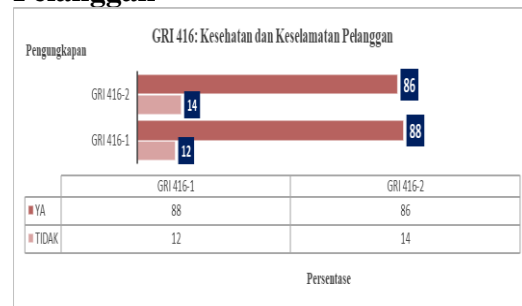
Secara umum, terkait dengan pengungkapan informasi penilaian sosial pemasok, mayoritas pegawai pemerintah daerah setuju untuk mengungkapkan informasi tentang penilaian sosial pemasok. Ini terlihat dari jumlah responden yang menyatakan setuju sampai dengan 76%.

Kebijakan Publik



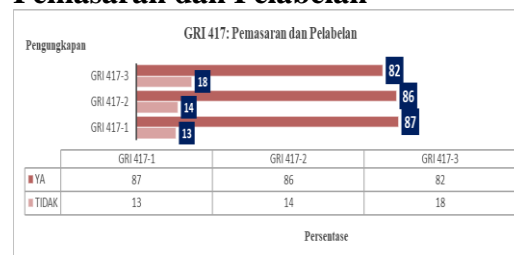
Secara umum, terkait dengan pengungkapan informasi kebijakan publik, mayoritas pegawai pemerintah daerah setuju untuk mengungkapkan informasi tentang kontribusi politik terhadap kebijakan publik. Ini terlihat dari jumlah responden yang menyatakan setuju sampai dengan 75%.

Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan



Secara umum, terkait dengan pengungkapan informasi Kesehatan dan keselamatan pelanggan, mayoritas pegawai pemerintah daerah setuju untuk mengungkapkan informasi tentang Kesehatan dan keselamatan pelanggan. Ini terlihat dari jumlah responden yang menyatakan setuju sampai dengan 87%.

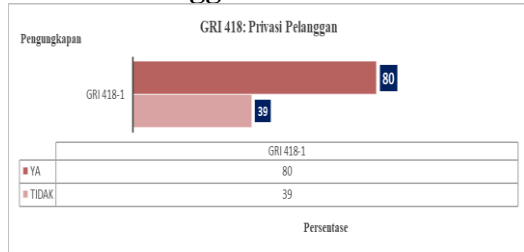
Pemasaran dan Pelabelan



Secara umum, terkait dengan pengungkapan informasi pemasaran dan pelabelan, mayoritas pegawai pemerintah daerah setuju untuk

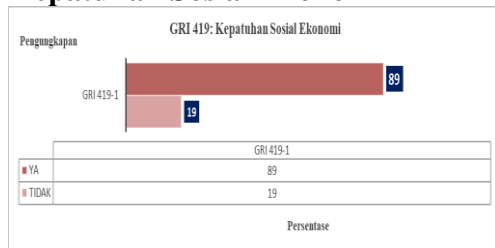
mengungkapkan informasi tentang pemasaran dan pelabelan. Ini terlihat dari jumlah responden yang menyatakan setuju sampai dengan 85%.

Privasi Pelanggan



Secara umum, terkait dengan pengungkapan informasi privasi pelanggan, mayoritas pegawai pemerintah daerah setuju untuk mengungkapkan informasi tentang privasi pelanggan. Ini terlihat dari jumlah responden yang menyatakan setuju sampai dengan 80%.

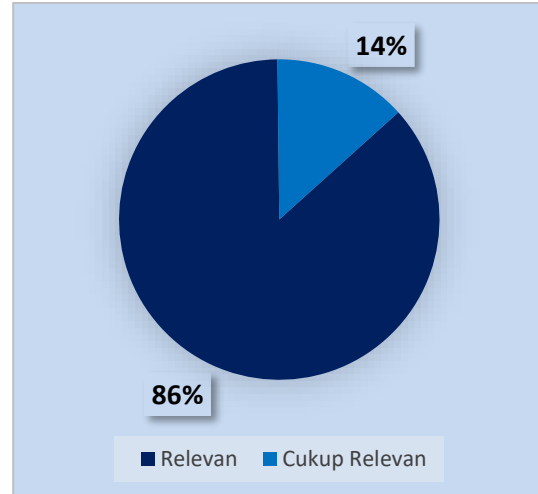
Kepatuhan Sosial Ekonomi



Secara umum, terkait dengan pengungkapan informasi kepatuhan sosial ekonomi, mayoritas pegawai pemerintah daerah setuju untuk mengungkapkan informasi tentang kepatuhan sosial ekonomi. Ini terlihat dari jumlah responden yang menyatakan setuju sampai dengan 89%.

Pengungkapan Secara Keseluruhan

Berdasarkan analisis 37 kelompok pengungkapan informasi GRI, maka dapat diketahui pemahaman bentuk Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) pemerintah daerah sebagai berikut:



Grafik 9. Bentuk Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) pemerintah daerah

Berdasarkan grafik di atas, terdapat 32 kelompok pengungkapan GRI yang relevan atau sekitar 86% dengan pemerintah daerah, sedangkan terdapat 5 pengungkapan GRI yang cukup relevan atau sekitar 14% dengan pemerintah daerah.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura telah memiliki tingkat pengetahuan yang cukup baik mengenai Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*). Hal ini ditunjukkan oleh 75% dari 114 responden yang menyatakan pernah mendengar, melihat, dan/atau membaca Laporan Keberlanjutan, sementara 25% atau sekitar 39 responden menyatakan belum pernah terpapar laporan tersebut. Dari sisi pemahaman, 71% dari 109 responden menyatakan memahami konsep Laporan Keberlanjutan, sedangkan 29% atau sekitar 44 responden mengaku belum memahaminya. Selain itu, sebanyak 74% dari 113 responden menyatakan memahami bentuk atau struktur Laporan Keberlanjutan, sementara 26% atau

sekitar 40 responden belum memahami bentuk laporan tersebut.

Berdasarkan analisis terhadap pengungkapan Global Reporting Initiative (GRI), ditemukan bahwa 32 kelompok pengungkapan atau sekitar 86% dinilai relevan dengan konteks pemerintah daerah. Di antara kelompok tersebut, pengungkapan terkait anti-korupsi, dampak ekonomi tidak langsung, dan hak masyarakat adat menempati prioritas tertinggi. Sementara itu, terdapat 5 kelompok pengungkapan GRI atau sekitar 14% yang dinilai cukup relevan dengan pemerintah daerah, dengan kelompok Keanekaragaman dan Kesempatan Setara menempati urutan terakhir dalam skala prioritas. Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar indikator GRI dapat diadaptasi dalam penyusunan Laporan Keberlanjutan di lingkungan pemerintah daerah, meskipun tingkat prioritasnya berbeda-beda.

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar responden di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura dapat meluangkan waktu yang cukup dalam mengisi kuesioner terkait Laporan Keberlanjutan, sehingga data yang diperoleh dapat lebih optimal dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Selain itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai Laporan Keberlanjutan dengan cakupan yang lebih luas, baik dari segi jumlah responden maupun wilayah penelitian. Penelitian selanjutnya juga disarankan untuk menguji instrumen kuesioner secara lebih mendalam serta menggunakan metode analisis yang beragam agar menghasilkan temuan yang lebih komprehensif dan mendalam mengenai implementasi Laporan Keberlanjutan di sektor publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. Karimuddin, Jannah. Misbahul., dkk. (2022). Metodologi Penelitian Kuantitatif. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini
- Asarina. R. (2011). BAB II Kajian Teori. UNY
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (2020). Laporan Berkelanjutan BPK 2020. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
- Fuadah, L. L., Yuliani, Safitri. R. H. (2018). Pengungkapan Sustainability Reporting Di Indonesia. CitraBooks.
- Ball, Amanda. (2004). A sustainability accounting project for the UK local government sector? Testing the social theory mapping process and locating a frame of reference. *Critical Perspectives on Accounting* 15 (2004) 1009–1035
- Djaenuri. M. A., Enceng. (2020). Modul Konsep-konsep Dasar Pemerintah Daerah. IPEM4214
- IFRS.(2020). Consultation Paper On Sustainability Reporting. Yayasan IFRS
- Initiative, G. R. (2020). Prinsip-Prinsip Pelaporan Dan Pengungkapan Standar. Global Reporting Initiative
- Nasution. L. M. (2017). Statistik Deskriptif. *Jurnal Hikmah*, Volume 14, No. 1, Januari – Juni 2017, ISSN :1829-8419
- Purba. Elvis. F & Simanjuntak. P. (2011). Metode Penelitian. Percetakan SADIA
- Sciulli, Nick. (2011). Influences on Sustainability Reporting within Local Government. *International Review of Business Research Papers* Vol. 7. No. 2. March 2011. Pp. 282- 291
- Taluke. D., Lakat. R. S., Sembel, A. (2019). Analisis Preferensi

Masyarakat Dalam Pengelolaan Ekosistem Mangrove Di Pesisir Pantai Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal Spasial* Vol 6. No. 2, 2019
ISSN 2442-3262

Widyasanti. A. A & Sardjunani. N. (2020). *Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Tpb)/ Sustainable Development Goals (Sdgs)*. Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Williams, B., Wilmshurst, T., Clift, R. (2011). Sustainability reporting by local government in Australia: Current and future prospects. *Accounting Forum* 35 (2011) 176–186